

**PENDIRIAN BUMDES DENGAN AKTA
NOTARIS BERBADAN HUKUM
PERKUMPULAN**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan**

Oleh:

Nama : Steven Federik

NIM : 217182023



**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2021**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA**

TANDA PENGESAHAN TESIS

Nama: STEVEN FEDERIK
NIM: 217182023

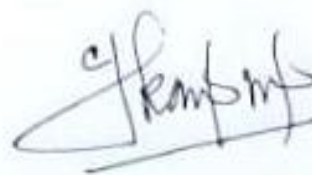
JUDUL TESIS:

Pendirian BUMDES dengan Akta Notaris Berbadan Hukum Perkumpulan

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji yang dibentuk oleh Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan dinyatakan LULUS dalam sidang ujian tanggal 26 Januari 2021, dengan Majelis Penguji terdiri atas:

1. Ketua Penguji : Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn.
2. Anggota Penguji : Dr. Tjempaka, S.H., M.H., M.Kn.
Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., S.S., M.H.

Jakarta, 28 Januari 2021
Pembimbing,



Dr. Tjempaka, S.H., M.H., M.Kn.

**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
TANDA PENGESAHAN TESIS UNTUK DIUJI**

Nama Peserta : Steven Federik

N.I.M : 217182023

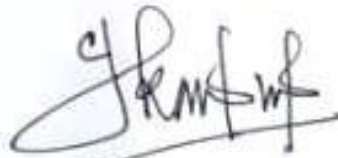
Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN

JUDUL TESIS :
**PENDIRIAN BUMDES DENGAN AKTA NOTARIS BERBADAN HUKUM
PERKUMPULAN**

Secara substansi telah dinyatakan siap untuk diujikan

Jakarta, 02-01-2020

Pembimbing Tesis,



(Dr. Tjempaka, S.H., M.H., M.Kn.)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kata panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penulis dapat diberi kemampuan melewati segala kendala yang muncul untuk menyelesaikan Tesis yang berjudul: **“PENDIRIAN BUMDes DENGAN AKTA NOTARIS BERBADAN HUKUM PERKUMPULAN”**. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar Magister Kenotariatan. Tesis ini untuk memenuhi syarat memperoleh gelar M.Kn di Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Penulisan tesis ini berawal dari hobi penulis untuk membaca baik yang bertopik seputar hukum, ekonomi, politik, dan sosial, penulis menemukan bahwa cita-cita pembangunan Indonesia juga diinginkan tidak hanya berpusat pada pembangunan “jawa sentris” perkotaan tetapi juga pada daerah pinggiran atau terpencil hal-hal tersebut membuat pemerintah pusat mengambil langkah-langkah guna cita-cita tersebut dapat tercapai, dalam hal ini secara khusus mengenai BUMDes.

BUMDes sebagai salah satu bentuk penggerak ekonomi desa dari daerah pinggiran ataupun daerah terpencil memiliki berbagai peran yang cukup penting berdasarkan ciri-ciri kehidupan ekonomi maupun sosial masyarakat desa, dalam perkembangannya BUMDes mengalami berbagai kendala baik secara kegiatan usahanya yang sering bermasalah atau merugi maupun secara khusus yang penulis

bahas dalam tesis ini adalah dalam hal pendiriannya dimana terdapat kesalahpahaman antar institusi baik swasta maupun pemerintah.

Meskipun penulis telah berusaha menyusun tesis ini dengan sungguh-sungguh dengan keterbatasan yang ada, penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat kekurangan dalam Tesis yang dibuat ini. Dengan segala kerendahan hati dan keterbukaan, penulis menerima segala bentuk masukan, baik itu berupa saran, koreksi maupun kritik yang bersifat membangun demi perbaikan tesis ini.

Dengan tersusunnya Tesis ini, Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing Penulis sehingga Tesis ini dapat selesai disusun. Ucapan terima kasih ini disampaikan terutama kepada:

1. Prof., Dr. Agustinus Purna Irawan, S.T., M.T., selaku Rektor Universitas Tarumanagara;
2. Prof., Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Prof. Dr. Mella Ismelina F. Rahayu, S.H., M.Hum., selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum yang telah membantu saya dalam memberikan arahan dan bimbingan selama saya menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Tarumanagara;
5. Dr. Tjempaka S.H., M.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing Penyusunan Tesis juga sebagai Dosen saya di program studi Strata 1 yaitu PLKH V Teknik

Pembuatan Akta dan di program Studi Strata 2 Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak pernah lelah dalam membimbing, memberi pengetahuan, solusi permasalahan dan waktunya untuk penulis;

6. Serta Para Dosen Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Tarumanagara yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan selama saya mengikuti perkuliahan.
7. Jackson dan Sherli, selaku orang tua Penulis yang selama ini telah memberikan semangat, kasih sayang yang tidak putus-putus, bimbingan dan dorongan baik secara moral maupun materiil;
8. Alm. dr. Yulyta Federik dan Andri Wong, selaku kakak dan kakak ipar yang telah mengubah pola pikir menjadi orang yang haus akan ilmu dan juga semangat pantang menyerah dalam menyusun Tesis;
9. Ronald Federik, S.E., dan Henny Susanto, S.E., selaku kakak dan kakak ipar yang telah memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung;
10. Ayin, selaku pengasuh yang telah merawat Penulis sedari kecil yang tidak hentinya memberikan perhatian;
11. Scarlet Yulita Wong, Lexie Yulyta Wong, Marvelino Federik, Edward Federik, Jeslyn Federik selaku keponakan yang telah memberikan secercah senyuman selama masa penulisan Tesis ini;
12. Kepada teman-teman “Angkatan 5” di Fakultas Hukum Magister Kenotariatan terutama rekan seperjuangan perkuliahan; Armey Haryssa, Devi, Selvi Nur

Alfrianty, Sannur B. Mallau, yang telah memberikan semangat sehingga saya termotivasi menyelesaikan tesis ini;

13. Kepada Teman-teman dari Grup Nobile, Bang Ali Akiram, Bang Bahtiar, Bang Bernadus Tomo, Kak Shinta Maharani, Bang Loius Mamusung, Kak Veronica C.K., Soenarjo;

14. Kepada Rekan-rekan penulis yang ada di Jabodetabek secara tidak langsung memberikan semangat maupun solusi dalam penulisan tesis ini Royki, Ryan Rudyarta, Budi Salim dan Dede Aling, Rio Arvianto, Eko dan Lilie Kurniawan, Jacky Djohan, Hairul Sappar, dll.

15. Kepada teman-teman sekampung, Devid Liyansyah, Ronny Santoso, Marvin Pratama, Melling Prasetya, Chris Deviyanti Tan, Evi Meiviana Thio, Tommy Lim, Vivianty, Novita Yeni S., atas dukungan moril dan semangat baik secara langsung maupun tidak langsung;

16. Tjauw Wen Hoe dan Tjong Min Sioe selaku om dan tante yang telah memberikan nasihat dan semangat dalam menjalankan perkuliahan;

17. dr. Jusuf SK. Sebagai seorang yang telah membantu Penulis berpikiran terbuka dan pemberi semangat serta inspirasi;

18. dr. Ari Yusnita selaku kakak yang terus memberi semangat dan inspirasi untuk terus berjuang tanpa mengenal lelah;

Tesis ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam bentuk informasi untuk pengembangan Ilmu Hukum dan menjadi referensi yang bermanfaat bagi para pembaca khususnya di kalangan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan masyarakat luas pada umumnya.

Penulis sangat menyadari bahwa Tesis ini tidak luput dari kesalahan, oleh karena itu Penulis sangat membutuhkan kritik dan saran dari penguji dalam penyempurnaan Tesis ini.

Akhir kata, Penulis menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan-kesalahan di dalam Penulisan Tesis ini, baik dalam hal materi maupun dalam teknis Penulisan. Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak-pihak yang terkait dalam membantu pembuatan Tesis ini.

Jakarta, 05 Januari 2021

Steven Federik

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR SINGKATAN	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Konseptual	10
E. Kerangka Teoretis.....	12
F. Metode Penelitian	22
G. Sistematika Penulisan	25
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Badan Hukum	27
1. Pengertian Badan Hukum.....	27
2. Bentuk Badan Hukum Sebagai Subjek Hukum.....	37
3. Badan Hukum Privat dan Badan Hukum Publik.....	44
4. Tanggungjawab Perbuatan Badan Hukum	46
B. Tinjauan tentang Perkumpulan Sebagai Badan Hukum	50
1. Pengertian dan Dasar Hukum Pengaturan Perkumpulan .	50
2. Syarat Pendirian Perkumpulan	55

3. Pengaturan Perkumpulan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Organisasi Kemasyarakatan.....	59
C. Badan Usaha Milik Desa	60
D. Tinjauan tentang Akta Notaris.....	68
E. Tinjauan Tentang Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Pendirian Badan Hukum Perkumpulan.....	78
BAB III: DATA HASIL PENELITIAN	
A. Profil BUMDes Magakaryaa Bangkit	85
B. Dasar Hukum Pendirian BUMDes Margakaya Bangkit	91
C. Stuktur Organisasi BUMDes Margakaya Bangkit	93
BAB IV : ANALISIS	
A. Legalitas dan Implikasi Hukum Terhadap Pendirian BUMDes Dengan Akta Notaris Berbadan Hukum Perkumpulan.....	100
B. Tanggungjawab Notaris dan Akta Pendirian BUMDes Margakaya Bangkit Dengan Akta Notaris Berbadan Hukum Perkumpulan.....	118
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	127
B. Saran	129
DAFTAR PUSTAKA	131
DAFTAR LAMPIRAN	

ABSTRAK

Judul tesis : Pendirian Bumdes Dengan Akta Notaris Berbadan Hukum Perkumpulan
Nama Mahasiswa : Steven Federik
Nim : 217182023
Kata Kunci : BUMDes Margakaya Bangkit, Desa, Akta Notaris, Perkumpulan
Isi Abstrak :

BUMDes yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai badan usaha, namun belum secara tegas tertulis sebagai badan hukum. Tidak ditegaskannya kedudukan BUMDes sebagai badan hukum mengakibatkan sejumlah hal, di antaranya BUMDes tidak memiliki *legal standing* atau kedudukan yang sah dan setara di hadapan hukum. Melihat fakta tersebut menunjukkan bahwa BUMDes belum bisa betul-betul menggunakan payung hukum dari BUMDes sendiri. BUMDes yang dibentuk melalui musyawarah desa dan disahkan melalui peraturan desa yang berarti sah sebagai badan hukum, belum dapat menyetarakan kedudukannya di hadapan hukum. Kondisi ini menjadikan BUMDes sulit menjalin kerjasama bisnis dengan pihak lain dan sulit menjangkau modal perbankan sehingga menghambat kesempatan perluasan usaha BUMDes. Maka dari itu, seringkali ditemukan pengurus BUMDes menghadap ke notaris untuk dibuatkan akta, salah satunya akta pendirian BUMDes Margakarya Bangkit. Tujuan dibuatkan akta tersebut yaitu untuk membuat rekening yang dipersyaratkan pihak bank serta untuk memudahkan kerjasama bisnis dengan pihak lain. Sehingga timbul permasalahan bagaimanakah legalitas dan implikasi hukum terhadap pendirian BUMDes dengan akta notaris berbadan hukum perkumpulan dan bagaimana tanggungjawab notaris terhadap akta pendirian BUMDes Margakarya Bangkit dengan akta notaris berbadan hukum perkumpulan. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Akta pendirian perkumpulan BUMDes Margakarya Bangkit telah memenuhi syarat legalitas sebagai akta yang ditentukan Pasal 1868 jo Pasal 1338 KUHPer karena dibuat berdasarkan ketentuan perundang-undangan serta adanya kehendak pemohon, sehingga implikasinya memiliki kekuatan hukum dan memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum untuk proses pembukaan rekening yang dipersyaratkan pihak bank. Akan tetapi, suatu kekeliruan ketika menganggap pendirian BUMDes dilakukan dengan membuat akta notaris apalagi berbentuk akta perkumpulan, sehingga berdasarkan Pasal 16 (1) huruf a UUJN jo Pasal 16 Ayat (11) tindakan notaris TN, SH, MH dalam menjalankan tugasnya tidak cermat dalam memahami ketentuan perundang-undangan BUMDes yang semestinya BUMDes tidak perlu di aktakan karena cukup dengan Peraturan Desa sudah sah sebagai badan hukum. Selain itu, notaris juga melanggar Pasal 3 angka ke-5 jo Pasal 6 Kode Etik Notaris. Sebagai seorang notaris harus memiliki pengetahuan yang luas termasuk masalah pendirian BUMDes yang tidak perlu akta notaris. Atas pelanggaran UUJN dan Kode Etik tersebut notaris TN, SH, MH, dapat dikenai sanksi administrasi dengan peringatan tertulis atau teguran dari organisasi notaris.